

TAHUN 2021

**LKIP (LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH)**



**PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**





KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena pada akhir tahun anggaran 2021 ini, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten telah berhasil menyusun LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2021.

LKIP merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan amanah yang diberikan sebagaimana diatur dalam PermenPANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Merupakan suatu kebanggaan bagi kami dapat menyelesaikan dan menyerahkan LKIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten Tahun 2021 sesuai ketentuan yang berlaku. Oleh karenanya kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dan kerjasama seluruh jajaran di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten.

Akhirnya, kami berharap agar informasi yang disajikan dalam LKIP Tahun 2021 dapat dimanfaatkan untuk melakukan evaluasi atas kinerja pembangunan serta koreksi atas kelemahan yang ada dan dapat mempertajam prioritas rencana pembangunan di tahun yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja pembangunan untuk mewujudkan Visi Gubernur Banten tahun 2017-2022.

**"BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING SEJAHTERA DAN BERAKHLAKUL
KARIMAH"**

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Serang Februari 2021

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
PROVINSI BANTEN





RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Provinsi Banten Tahun 2021 ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten Tahun 2017-2022. Laporan Kinerja sebagai alat kendali dan alat penilai kinerja secara kuantitatif dan perwujudan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi DPK menuju terwujudnya good governance yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Didalamnya memuat gambaran mengenai pencapaian sasaran strategis Tahun 2021 yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan. Untuk mencapai terwujudnya Visi Provinsi Banten khususnya Misi ke-1 **“Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (good governance)”** ditetapkan 2 (dua) sasaran strategis, dengan 2 (dua) indikator kinerja. Dan untuk mendukung Misi ke-3 **“Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan berkualitas”** ditetapkan 1 (satu) sasaran strategis dengan 1 (satu) indikator kinerja. Indikator kinerja tersebut merupakan ikhtisar hasil (outcome) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas pokok dan fungsi DPK. Hal ini dimaksudkan agar kinerja yang telah dicapai dapat lebih terukur tingkat kemanfaatannya, tidak hanya sekedar pencapaian output kegiatan. Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis diilustrasikan dalam tabel berikut:

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	A (85)	BB (70,65)	83,12%
Meningkatnya pengelolaan arsip pemerintah daerah yang berkualitas	Persentase OPD yang menyelenggarakan kearsipan sesuai ketentuan kearsipan	95%	100%	105,26%
Meningkatnya budaya literasi	Indeks Minat Baca Masyarakat	45	57,81	128,47%

Berdasarkan tabel diatas untuk sasaran tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Akuntabel, Efektif dan Efisien dengan indikator Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD kinerja dengan nilai 70,65 % dari target 85 % atau capaian sebesar 83,12%. Sedangkan sasaran Meningkatkan pengelolaan arsip pemerintah daerah yang berkualitas dengan indikator Persentase OPD yang menyelenggarakan kearsipan sesuai ketentuan kearsipan terealisasi 100% atau mencapai 105,26%, dikarenakan pada Tahun 2021 seluruh OPD Provinsi Banten sudah melaksanakan kearsipan sesuai ketentuan, dengan indikator : sudah tersedia SDM, sarana prasarana kearsipan, dan tata cara pengelolaan kearsipan,serta bermuara pada tersedianya record center pada setiap OPD. Untuk sasaran Meningkatkan budaya literasi dengan indikator Indeks Minat Baca Masyarakat terealisasi 57,81 atau mencapai 128,47%, dimana Survey indeks minat baca dilakukan oleh lembaga independen (PT Tribuana Cipta Konsultan). Berdasarkan data dari Perpunas RI, Nilai TGM Provinsi Banten juga sudah berada diatas rata -rata nasional (rata rata nasional = 55.74).



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
Dasar Pembentukan DPK Provinsi Banten	1
Tugas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten	2
Struktur Organisasi	4
Isu Strategis	5
Sumber Daya Manusia	6
Sarana dan Prasarana	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	11
Uraian Singkat Rencana Strategis	11
Perjanjian Kinerja (PK)	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	19
Capaian Kinerja Organisasi	19
Realisasi Anggaran	43
BAB IV PENUTUP	47
Kesimpulan	47
Saran	47

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Dasar Pembentukan DPK Provinsi Banten

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Provinsi Banten dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah Provinsi Banten dengan melaksanakan fungsi perpustakaan dan kearsipan.

DPK Provinsi Banten melaksanakan tugas pokok sesuai dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten. Dimana tugasnya adalah membantu gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan dan bidang kearsipan serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi



Gambar 1.2
Kegiatan Perpustakaan



Gambar 1.3
Kegiatan Kearsipan

1.2. Tugas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten

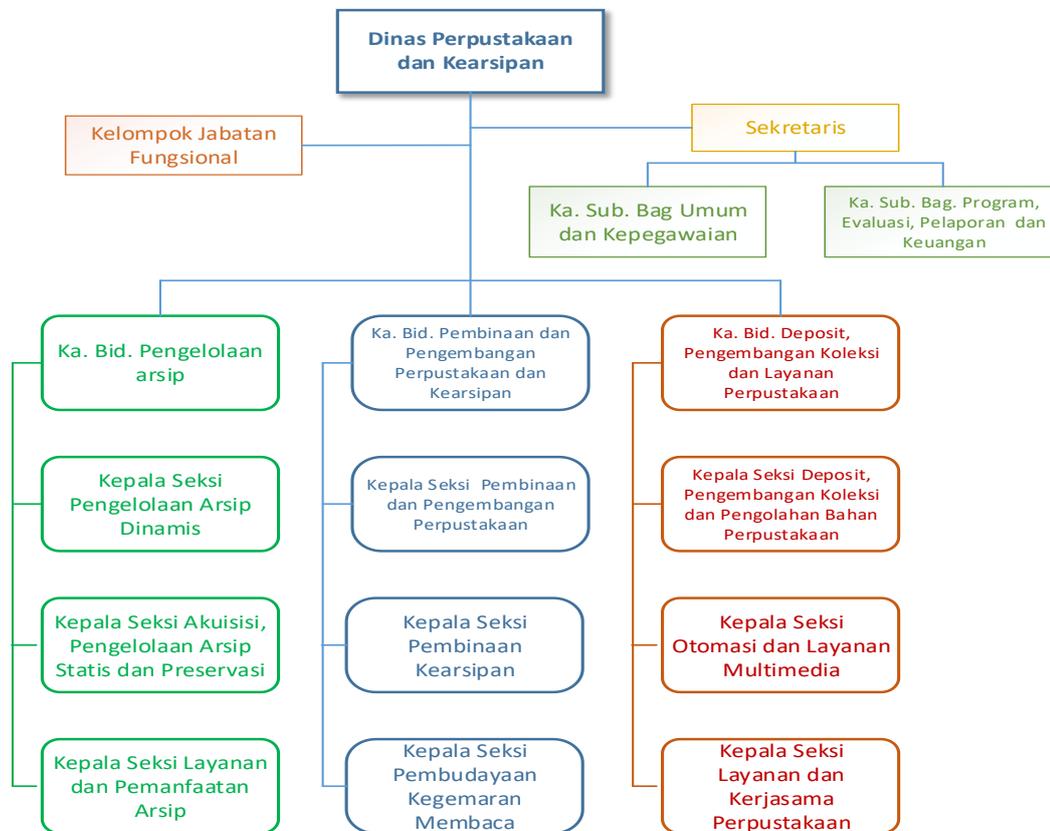
Sesuai dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 bahwa tugas DPK Provinsi Banten adalah membantu gubernur melalui koordinasi Sekretaris Daerah melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan dan bidang kearsipan serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi. Tugas tersebut diuraikan sebagaimana berikut :

1. Pengelolaan perpustakaan tingkat provinsi;
2. Pembudayaan gemar membaca tingkat provinsi;
3. Pelestarian karya cetak dan karya rekam koleksi daerah di provinsi;
4. Penerbitan katalog induk daerah dan bibliografi daerah;
5. Pelestarian naskah kuno milik provinsi;
6. Pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi;
7. Pengelolaan arsip dinamis Pemerintah daerah provinsi dan BUMD provinsi;



8. Pengelolaan arsip statis yang diciptakan oleh Pemerintah Daerah provinsi, BUMD provinsi, perusahaan swasta yang cabang usahanya lebih dari 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi, organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah provinsi, organisasi politik tingkat Daerah provinsi, tokoh masyarakat tingkat Daerah provinsi;
9. Pengelolaan simpul jaringan dalam SIKN melalui JIKN pada tingkat provinsi;
10. Pemusnahan arsip di lingkungan Pemerintah Daerah provinsi yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun;
 11. Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang berskala provinsi;
 12. Penyelamatan arsip Perangkat Daerah provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan pemekaran Daerah kabupaten/kota;
 13. Penyelenggaraan autentikasi arsip statis dan arsip dinamis hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan provinsi;
 14. Melaksanakan pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan provinsi yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip;
 15. Penerbitan rekomendasi izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah provinsi; dan
 16. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.3. Struktur Organisasi



Gambar 1.3
Struktur Organisasi DPK Provinsi Banten

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2017, struktur DPK Provinsi Banten terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris, serta tiga bidang, yaitu : 1) Bidang Deposit, Pengembangan Koleksi, dan Layanan Perpustakaan, 2) Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan dan Kearsipan, 3) Bidang Pengelolaan Arsip, serta jabatan fungsional. Struktur organisasi DPK Provinsi Banten terdiri dari :

- A. Kepala Dinas
- B. Sekretaris
 - a. Kasubag Umum dan Kepegawaian
 - b. Kasubag Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan
- C. Kepala Bidang Deposit, Pengembangan Koleksi, dan Layanan Perpustakaan
 - a. Kepala Seksi Deposit, Pengembangan Koleksi, dan Pengolahan Bahan Perpustakaan
 - b. Kepala Seksi Otomasi dan Layanan Multimedia
 - c. Kepala Seksi Layanan dan Kerjasama Perpustakaan
- D. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan dan Kearsipan



- a. Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan
- b. Kepala Seksi Pembinaan Kearsipan
- c. Kepala Seksi Pembudayaan Kegemaran Membaca
- E. Kepala Bidang Pengelolaan Arsip
 - a. Kepala Seksi Pengelolaan Arsip Dinamis
 - b. Kepala Seksi Akuisisi, Pengelolaan Arsip Statis dan Preservasi
 - c. Kepala Seksi Layanan dan Pemanfaatan Arsip
- F. Jabatan Fungsional

Terdapat 22 jabatan fungsional, yang terdiri dari : 13 orang pustakawan, 7 orang arsiparis dan 2 orang penterjemah

1.4 Isu Strategis

Isu utama pengembangan perpustakaan dan kearsipan Provinsi Banten adalah peningkatan minat baca masyarakat dan pengelolaan kearsipan sesuai dengan ketentuan kearsipan. Untuk Kearsipan, pekerjaan utama adalah bagaimana upaya mempertahankan dan meningkatkan Hasil Nilai Pengawasan Kearsipan DPK, maupun nilai pengawasan kearsipan eksternal dan internal Pemerintah Provinsi Banten. Selain itu, pada tahun terakhir Renstra DPK, lahir isu strategis baru dari Perpustakaan Nasional RI yakni pengembangan Indeks Pembangunan Literasi (IPLM). Dimana pada posisi hasil kajian tahun 2021, Provinsi Banten menempati 5 terbawah hasil kajian IPLM secara nasional. Hal ini tentu perlu disikapi secara serius dalam pelaksanaan pembangunan di tahun mendatang. Selain itu terdapat isu strategis dan tantangan lain yang dihadapi dalam penyelenggaraan perpustakaan dan kearsipan di Provinsi Banten yang terbagi berdasarkan analisis tantangan dan peluang diantaranya :

1. Tantangan

Analisis lingkungan eksternal menghasilkan tantangan di lingkungan DPK Provinsi Banten , diantaranya :

- a. Perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat, menuntut penyesuaian dari segi inovasi layanan perpustakaan maupun aplikasi teknologi bagi pengelolaan arsip;
- b. Pemerataan akses layanan perpustakaan yang belum merata di daerah perkotaan dan daerah pelosok;
- c. Adanya peran perpustakaan untuk berpartisipasi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan koleksi dan sarana prasarana;
- d. Digitalisasi arsip sebagai antisipasi keterbatasan record center dan Depo arsip;
- e. Belum banyaknya OPD di lingkup Pemerintah Provinsi Banten yang melakukan penyusutan arsip sebagaimana undang-undang;
- f. Keterbatasan ruangan depo arsip DPK Provinsi Banten

2. Peluang

- a. Terbukanya peluang untuk mengembangkan perpustakaan digital baik dari sisi koleksi maupun tata kelola perpustakaan dengan memanfaatkan teknologi informasi;
- b. Terbukanya peluang menjalin kerjasama untuk mendukung inovasi pelayanan perpustakaan ataupun memenuhi sarana prasarana perpustakaan dengan pihak swasta melalui Forum CSR Provinsi Banten;
- c. Adanya dukungan pemerintah pusat dan daerah pada program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial sebagai bentuk keikutsertaan perpustakaan dalam peningkatan kesejahteraan
- d. Terbukanya peluang mengintegrasikan pengelolaan arsip dengan memanfaatkan teknologi informasi melalui aplikasi SRIKANDI dari Arsip Nasional RI;
- e. Terbukanya peluang untuk membangun depo arsip provinsi Banten yang representatif dengan dukungan APBD Provinsi Banten
- f. Terbukanya peluang penyusunan regulasi penyusutan arsip untuk diimplementasikan pada lingkup Pemerintah Provinsi Banten;

1.5 Sumber Daya Manusia

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten didukung aparatur yang terbagi menurut bidang dan sekretariat. Pada tahun 2021 jumlah pegawai yang berada di lingkungan Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Daerah Provinsi Banten adalah sebanyak 111 orang.

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan 2021

No	Pendidikan	PNS (orang)	CPNS (orang)	TKK/TKS (orang)	Jumlah Pegawai (orang)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6(3+4+5)	(7)
1.	S3	-	-	-	-	-
2.	S2	13	-	-	13	11,2
3.	S1	28	-	19	47	42,2
4.	D3	4	-	-	4	3,4
5.	SMA	19	-	28	47	43,1
Jumlah		64	0	47	111	100

Sumber : Hasil olahan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DPK Provinsi Banten

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural Dan Jabatan Fungsional

No	Jabatan Struktural	Jumlah	Jabatan Fungsional	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Esselon II	1	Pustakawan	13
2.	Esselon III	4	Arsiparis	8
3.	Esselon IV	11	Penerjemah	2
4.	-	-	Fungsional Umum/Pelaksana	25
Jumlah		16		48

Sumber : Hasil olahan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DPK Provinsi Banten

Tabel 1.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan jenis Kelamin

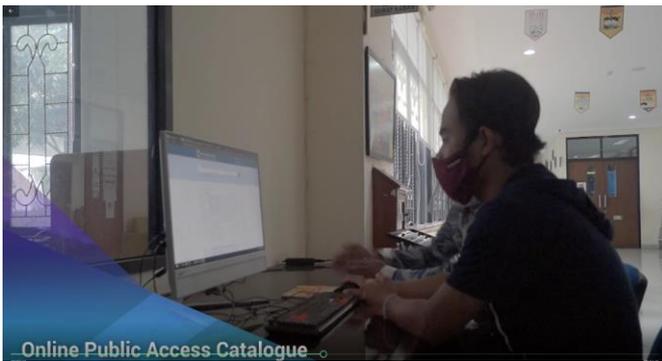
No	Jenis Kelamin	Jumlah
(1)	(2)	(3)
1.	Laki-Laki	65
2.	Perempuan	46
Jumlah		111

Sumber : Hasil olahan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DPK Provinsi Banten



1.6. Sarana dan Prasarana





Gambar 1.4
Sarana dan Prasarana DPK Provinsi Banten



Dukungan sarana dan prasarana mempunyai peran strategis dalam pelaksanaan kegiatan perpustakaan dan kearsipan Provinsi Banten. DPK Provinsi Banten menempati lahan seluas 7.500 m² yang berlokasi di Jl. Raya Jakarta – Serang KM 04 Pakupatan Kota Serang Provinsi Banten.

Sarana utama yang dimiliki Dinas Perpustakaan dan Kearsipan diantaranya ruang lobby, ruang layanan internet, ruang koleksi e-book, ruang koleksi baca anak, ruang koleksi baca umum, BI Corner, ruang audio visual, ruang referensi, ruang Banten Corner dan Depo arsip.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 URAIAN SINGKAT RENCANA STRATEGIS

2.1.1 Visi dan Misi

Visi yang ditetapkan dalam Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten tahun 2017 – 2022 menggambarkan bagaimana tujuan akhir yang diinginkan oleh Gubernur terpilih, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan, peluang dan budaya hidup yang ada di Provinsi Banten, yaitu :

**BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING, SEJAHTERA
DAN BERAKHLAKUL KARIMAH**

Adapun misi yang terkait dengan tugas dan fungsi DPK Provinsi Banten dalam mendukung visi tersebut adalah misi pertama dan ketiga, yaitu :

Misi Pertama : **Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)**

Misi ketiga : **Meningkatkan Akses dan Pemerataan Pendidikan Berkualitas**

2.1.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan yang ingin dicapai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten dalam kurun waktu 2017 – 2022 adalah :

1. Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, dan sumber daya aparatur yang berintegritas, berkompetensi serta Meningkatkan pengelolaan arsip pemerintah daerah yang tertib, rapi, dan handal;
2. Terwujudnya Akses dan Kualitas Pendidikan Menuju Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten menetapkan sasaran sebagaimana berikut :

1. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien

Hal ini diukur dari capaian Laporan Kinerja DPK Provinsi Banten

2. Meningkatnya Pengelolaan arsip pemerintah daerah yang berkualitas

Diukur berdasarkan Persentase OPD yang Menyelenggarakan kearsipan sesuai Ketentuan Kearsipan

3. Meningkatnya Budaya Literasi

Diukur berdasarkan Meningkatnya Budaya Literasi di Provinsi Banten



Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPK Provinsi Banten 2017 – 2022

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada tahun ke -				
				1	2	3	4	5
1	Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, dan sumber daya aparatur yang berintegritas, berkompetensi serta Meningkatkan pengelolaan arsip pemerintah daerah yang tertib, rapi, dan handal	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	B	BB	BB	A (85)	A (90)
		Meningkatnya Pengelolaan arsip pemerintah daerah yang berkualitas	Persentase OPD yang Menyelenggarakan kearsipan sesuai Ketentuan Kearsipan	80	85	90	95	100
2	Terwujudnya Akses dan Kualitas Pendidikan Menuju Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	Meningkatnya Budaya Literasi	Indek Minat Baca Masyarakat	30	35	40	45	50



Sedangkan target capaian kinerja sasaran tahun 2021 berdasarkan dokumen Renstra yang diampu sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Eselon II maupun Indikator Kinerja Program Eselon III, diuraikan pada table berikut :

Tabel 2.2
Target Indikator Kinerja Utama Eselon II dan Eselon III Tahun 2021

NO	SASARAN/INDIKATOR SASARAN/PROGRAM/INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2021
1	2	3	4
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien	Nilai	85
	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD		
2	Meningkatnya Pengelolaan arsip pemerintah daerah yang berkualitas	%	95
	Persentase OPD yang Menyelenggarakan kearsipan sesuai Ketentuan Kearsipan		
3	Meningkatnya Budaya Literasi	Indeks	45
	Indek Minat Baca Masyarakat		
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
1.1	Persentase terwujudnya penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	100
1.2	Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah	%	100
1.3	Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	%	100
1.4	Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	100
2	Program Pembinaan Perpustakaan		
2.1	Cakupan pembinaan perpustakaan Umum, perpustakaan khusus dan Perpustakaan Sekolah	%	100
2.2	Cakupan Pelayanan Perpustakaan Sesuai Standar Minimal Perpustakaan	%	85
3	Program Pengelolaan Arsip		



NO	SASARAN/INDIKATOR SASARAN/PROGRAM/INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2021
1	2	3	4
3.1	Persentase Digitalisasi Arsip Dinamis Daerah (Satuan: %)	%	95
3.2	Persentase Digitalisasi Arsip Statis Daerah (Satuan: %)	%	95
4	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip		
4.1	Persentase Pengelolaan Arsip OPD sesuai Standar (Satuan: %)	%	100

2.1.3 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan suatu cara atau pola yang dirancang untuk merespon isu strategis yang dihadapi dan/atau untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran suatu organisasi. Strategi jangka menengah RPJMD Provinsi Banten adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pengelolaan arsip pemerintah daerah yang tertib, rapi, dan handal

Strategi DPK, Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Arsip Pemerintah Daerah yang Handal dan Sesuai dengan Pemanfaatannya

2. Peningkatan Minat Baca Masyarakat melalui Optimalisasi penerapan teknologi informasi dan Perpustakaan Daerah

Strategi DPK, Meningkatkan diversifikasi layanan perpustakaan berbasis TIK, Mengembangkan perpustakaan menuju standart nasional yang menjangkau masyarakat luas, Menggalakkan sosialisasi/promosi/pemasyarakatan gemar membaca dan mengembangkan infrastruktur perpustakaan yang modern

Sedangkan Arah kebijakan merupakan rumusan yang merasionalisasi pilihan strategi agar lebih terarah mencapai tujuan sasaran dalam waktu 5 tahun, memiliki fokus berdasarkan identifikasi permasalahan dan isu strategis, mengarahkan target kinerja yang akan dicapai pada tingkatan strukur yang diperlukan untuk dapat menguatkan penyelesaian masalah sesuai dengan target indikator kinerja outcome. Arah kebijakan jangka menengah RPJMD Provinsi Banten adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan pengelolaan arsip pemerintah daerah secara profesional yang didukung dengan teknologi Informasi

Arah Kebijakan DPK Provinsi Banten : Melakukan Peningkatan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya

2. Peningkatan Minat Baca Masyarakat melalui Optimalisasi penerapan teknologi informasi dan Perpustakaan Daerah

Arah Kebijakan DPK Provinsi Banten : Peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan untuk meningkatkan minat baca dengan memanfaatkan TIK

Strategi dan kebijakan DPK Provinsi Banten dalam lima tahun mendatang, secara lengkap pada tabel berikut :

Tabel. 2.3
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan DPK Tahun 2017 – 2022

Visi : Banten yang Maju, Mandiri, Berdaya Saing, Sejahtera dan Berakhlakul Karimah			
Misi 1 : Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, dan sumber daya aparatur yang berintegritas, berkompetensi serta Meningkatkan pengelolaan arsip pemerintah daerah yang tertib, rapid an handal	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	Melakukan Peningkatan Kinerja Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang sesuai standar
	Meningkatnya Pengelolaan arsip pemerintah daerah yang berkualitas	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Arsip Pemerintah Daerah Yang Handal Dan Sesuai Dengan pemanfaatannya	Melakukan Peningkatan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya
MISI 3 : Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Pendidikan berkualitas			
Terwujudnya Akses dan Kualitas Pendidikan Menuju Sumber Daya Manusia yang Berdaya saing	Meningkatnya budaya literasi	Meningkatkan diversifikasi layanan perpustakaan berbasis TIK, Mengembangkan perpustakaan menuju standart nasional yang menjangkau masyarakat luas, Menggalakkan sosialisasi/promosi/pemasyarakatan gemar membaca dan mengembangkan infrastruktur perpustakaan yang modern	Peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan untuk meningkatkan minat baca dengan memanfaatkan TIK

2.1.4 Program dan Kegiatan

Rencana Program dan Kegiatan DPK untuk tahun 2017-2022 terdiri dari prioritas yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Banten. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut secara maksimal diharapkan mampu membantu terwujudnya sasaran dan tujuan DPK Provinsi Banten baik yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Banten 2017 – 2022 maupun yang tertuang dalam Renstra DPK. Program dan kegiatan tersebut sebagai berikut :

Tabel 2.5
Program, Kegiatan DPK Provinsi Banten berdasarkan Renstra Tahun 2017-2022

No	Program	Indikator Kinerja Program	No	Kegiatan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1. Persentase terwujudnya penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	1.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		2. Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah	2.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		3. Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah
			4.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
			5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
4.	Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	7.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
2.	Program Pembinaan Perpustakaan	1. Cakupan pembinaan perpustakaan Umum, perpustakaan khusus dan Perpustakaan	8.	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi



No	Program	Indikator Kinerja Program	No	Kegiatan
		Sekolah		
		2. Cakupan Pelayanan Perpustakaan Sesuai Standar Minimal Perpustakaan	9.	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi
3.	Program Pengelolaan Arsip	1. Persentase Digitalisasi Arsip Dinamis Daerah (Satuan: %)	10.	Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi
		2. Persentase Digitalisasi Arsip Statis Daerah (Satuan: %)	11.	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi
			12.	Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi
4.	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	1. Persentase Pengelolaan Arsip OPD sesuai Standar (Satuan: %)	13.	Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun

2.2. Perjanjian Kinerja (PK)

Perjanjian Kinerja (PK) menurut Permen PAN Nomor 53 Tahun 2014 adalah lembaran/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Gubernur Provinsi Banten memberi amanah kepada Kepala DPK untuk melaksanakan program Pembinaan Perpustakaan, Program Pengelolaan Arsip, dan Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip, dengan target dan indikator kinerja tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK). Pada awal Tahun 2021, melalui PK telah disepakati bahwa sasaran strategis DPK adalah : 1) Meningkatnya budaya literasi, dengan indikator kinerja "Indeks Minat Baca Masyarakat (Nilai)" dengan target kinerja 45, 2) Meningkatnya pengelolaan arsip pemerintah daerah yang berkualitas, dengan indikator kinerja "Persentase OPD yang menyelenggarakan kearsipan sesuai ketentuan kearsipan (%), dengan target kinerja 95% dan 3). Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien, dengan indikator kinerja "Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD (nilai), dengan target kinerja 85. Sasaran program beserta target yang telah ditetapkan dalam PK Kepala DPK, pencapaiannya didukung dengan pelaksanaan kegiatan pada setiap bidang dan sub bagian DPK. Dokumen PK Kepala DPK disajikan pada gambar 2.1 sedangkan dokumen PK pada Bidang dan sub bagian disampaikan pada lampiran.



SATUAN KERJA : DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DPPA TA-2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Budaya Literasi	Indek Minat Baca Masyarakat	Nilai	45.00
2	Meningkatnya Pengelolaan arsip pemerintah daerah yang berkualitas	Persentase OPD yang Menyelenggarakan kearsipan sesuai Ketentuan Kearsipan	%	95.00
3	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	Nilai	85

PENDAPATAN DAERAH
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) JUMLAH PENDAPATAN Rp. 0,00

BELANJA

KODE	URUSAN / PROGRAM	ANGGARAN
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	24.375.241.000,00
2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	21.465.788.000,00
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	2.909.453.000,00
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	1.631.775.000,00
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	1.000.525.000,00
2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	631.250.000,00
JUMLAH BELANJA Rp.		26.007.016.000,00

GUBERNUR
Dr. H. WAHIDIN HALIM, M.Si

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
USMAN ASSHIDDIQI QOHARA, S.Sos, M.Si
NIP. 19700320 200112 1 001

Gambar 2.6
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2021
Antara Kepala DPK dengan Gubernur Banten

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang dimaksud, yang ditetapkan dalam visi dan misi DPK. Pengukuran yang dimaksud itu merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran tingkat capaian kinerja DPK Tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja DPK Tahun 2021 dengan realisasinya. Adapun target Capaian Kinerja sasaran Tahun 2021 berdasarkan dokumen Renstra yang diampu sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Eselon II maupun Indikator Kinerja Program Eselon III, diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Target Indikator Kinerja Utama (Eselon II) Tahun 2021

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2021
1	2	3	4
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD (nilai)	85
2	Meningkatnya Pengelolaan arsip pemerintah daerah yang berkualitas	Persentase OPD yang Menyelenggarakan kearsipan sesuai Ketentuan Kearsipan (%)	95
3	Meningkatnya Budaya Literasi	Indek Minat Baca Masyarakat (Nilai)	45

Tabel 3.2
Target Indikator Kinerja Program (Eselon III) Tahun 2021

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2021
1	2	3	4
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1 Persentase terwujudnya penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (%)	100
		2 Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah (%)	100
		3 Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah (%)	100
		4 Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (%)	100
II	Program Pembinaan Perpustakaan	1 Cakupan pembinaan perpustakaan Umum, perpustakaan khusus dan Perpustakaan Sekolah (%)	100
		2 Cakupan Pelayanan Perpustakaan Sesuai Standar Minimal Perpustakaan (%)	85
III	Program Pengelolaan Arsip	1 Persentase Digitalisasi Arsip Dinamis Daerah (Satuan: %)	95
		2 Persentase Digitalisasi Arsip Statis Daerah (Satuan: %)	95
IV	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Persentase Pengelolaan Arsip OPD sesuai Standar (Satuan: %)	100

Capaian kinerja DPK Tahun 2021 dihitung berdasarkan lampiran Peraturan Gubernur Banten Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Banten dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Provinsi Banten Tahun 2017-2022.

Capaian kinerja DPK Provinsi Banten pada Tahun 2021 baik pada Indikator Kinerja Utama (Eselon II), maupun Indikator Kinerja Program (Eselon III), realisasinya sebagai berikut:



Tabel 3.3
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) DPK Provinsi Banten Tahun 2021

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2021	REALISASI TAHUN 2021
1	2	3	4	
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD (nilai)	85	70,65 (BB)
2	Meningkatnya Pengelolaan arsip pemerintah daerah yang berkualitas	Persentase OPD yang Menyelenggarakan kearsipan sesuai Ketentuan Kearsipan (%)	95	100
3	Meningkatnya Budaya Literasi	Indek Minat Baca Masyarakat (Nilai)	45	57.81

Tabel 3.4
Capaian Indikator Kinerja Program DPK Provinsi Banten Tahun 2021

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2021	REALISASI TAHUN 2021
1	2	3	4	5
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1 Persentase terwujudnya penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (%)	100	100
2 Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah (%)		100	100	
3 Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah (%)		100	95	
4 Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (%)		100	100	
II	Program Pembinaan Perpustakaan	1 Cakupan pembinaan perpustakaan Umum, perpustakaan khusus dan Perpustakaan Sekolah (%)	100	110,42
2 Cakupan Pelayanan Perpustakaan Sesuai Standar Minimal Perpustakaan (%)		85	83	
III	Program Pengelolaan Arsip	1 Persentase Digitalisasi Arsip Dinamis Daerah (Satuan: %)	95	100



NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2021	REALISASI TAHUN 2021
1	2	3	4	5
		2 Persentase Digitalisasi Arsip Statis Daerah (Satuan: %)	95	100
IV	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Persentase Pengelolaan Arsip OPD sesuai Standar (Satuan: %)	100	100

Pada tabel capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) eselon II untuk indikator sasaran perpustakaan dan kearsipan telah melebihi target yang ditetapkan, akan tetapi untuk indikator sekretariat dibawah target yang ditetapkan, yaitu 70,65 dari target 85 ini yang menyebabkan ada salah satu indikator yang tidak mampu untuk mendongkrak nilai SAKIP Pemerintah Provinsi Banten adalah belum adanya program/kegiatan yang dijadikan percontohan OPD/Provinsi lain pada Pemerintah Provinsi Banten. Sedangkan capaian Indikator Kinerja Program (eselon III) pada Tahun 2021 fluktuatif, ada yang melebihi target, namun ada juga tidak memenuhi target, yakni pada indikator Cakupan Pelayanan Perpustakaan Sesuai Standar Minimal Perpustakaan. Hal ini terjadi karena pada saat pandemic covid 19, DPK tidak membuka layanan offline, sehingga berpengaruh pada tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan.

3.1.1 Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan tahun sebelumnya

Secara umum, capaian kinerja baik pada indikator sasaran maupun indikator program cukup baik, meskipun ada beberapa yang tidak memenuhi target yang kondisinya berbeda setiap tahun. Hal ini memiliki alasan tersendiri baik karena alasan kebijakan penganggaran (refocusing) maupun situasi pandemic sebagai force majour yang sulit dihindari. Adapun perbandingan realisasi capaian disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Eselon II
Tahun 2018 s.d 2021

Sasaran	Indikator Kinerja	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama (Eselon II)							
		Target 2018	Target 2019	Target 2020	Target 2021	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	70	80	80	85	70	80	80,05	70,65
Meningkatnya Pengelolaan arsip pemerintah daerah yang berkualitas	Persentase OPD yang menyelenggarakan Kearsipan sesuai ketentuan kearsipan	80	85	90	95	85	93	95,35	100
Meningkatnya Budaya Literasi	Persentase peningkatan minat baca	30	35	0	0	30	59,79	0	0



Sasaran	Indikator Kinerja	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama (Eselon II)							
		Target 2018	Target 2019	Target 2020	Target 2021	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021
	masyarakat								
	Indek Minat Baca Masyarakat (nilai)	0	0	40	45	0	0	59,79	57,81

Tabel 3.6
Perbandingan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Eselon III
Tahun 2018 s.d 2021

Program	Indikator Kinerja Program RPJMD (Outcome)	Target				Realisasi			
		2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Program Tata Kelola Pemerintahan	Nilai IKM (Satuan: Skala (1-4))			0	0	3,10	3,23	0	0
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah (Satuan: %)	0	0	100	100	0	0	100	100
	Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah (Satuan: %)	0	0	100	100	0	0	100	95
	Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan: %)	0	0	100	100	0	0	100	100
	Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan: %)	0	0	100	100	0	0	100	100
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Cakupan pembinaan perpustakaan Umum dan perpustakaan khusus (Satuan: %)	85,00	90	95	0	85,00	85,71	79,17	0



PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	CAKUPAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN UMUM, PERPUSTAKAAN KHUSUS DAN PERPUSTAKAAN SEKOLAH	0	0	0		0	0	0	110,42
	Cakupan Pelayanan Perpustakaan Sesuai Standar Minimal Perpustakaan (Satuan: %)	0	0	0	85	0	0	0	83
Program Pengembangan Koleksi dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Perpustakaan	Cakupan Pelayanan Perpustakaan Sesuai Standar Minimal Perpustakaan (Satuan: %)	75,00	80	85	0	75,00	80	83	0
Program Pengelolaan Arsip	Persentase Digitalisasi Arsip Statis Daerah (Satuan: %)	80,00	85	90		80,00	85	90.00	100
	Persentase Digitalisasi Arsip Dinamis Daerah (Satuan: %)	80,00	85			80,00	85	90.70	100
	Persentase Pengelolaan Arsip OPD sesuai Standar (Satuan: %)	85,00			0	85,00	93	95.35	0
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase Pengelolaan Arsip OPD sesuai Standar (Satuan: %)	0	0	0	100	0	0	0	100

Catatan : Program eksisting sesuai Revisi Renstra DPK adalah Program dengan kolom warna kuning

3.1.2 Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Program

Berdasarkan rekapitulasi tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa untuk capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) eselon II telah melebihi target yang ditentukan khusus Perpustakaan dan Kearsipan dengan alasan sebagai berikut:

1. Rata - Rata capaian nasional, indeks minat baca Tahun 2020 adalah 54,74. Untuk tahun 2021, nilai capaian belum dirilis oleh Perpustakaan RI. Sedangkan nilai capaian indeks minat baca Provinsi Banten tahun 2021 adalah 57,81. Dengan demikian capaian indeks minat baca provinsi Banten adalah diatas rata - rata nasional. Beberapa hal yg melatarbelakangi capaian ini adalah gerakan pemasyarakatan minat baca yg masif melalui offline maupun media online (youtube, webinar, dll). Juga didukung dengan kerjasama DPK Kab/Kota dalam gerakan pemasyarakatan minat baca serta kesadaran masyarakat tentang membaca yang mulai tumbuh seiring kemajuan Teknologi Informasi Komputer
2. OPD yang melaksanakan kearsipan sesuai ketentuan kearsipan, diukur dari 4 kriteria : 1) Adanya record center, 2) Adanya SDM pengelola, 3) Adanya pengelolaan kearsipan (daftar arsip), 4) Adanya Anggaran Kearsipan. Dari semua OPD di Provinsi Banten sudah memenuhi 4 kriteria tersebut, sehingga capaian OPD yg melakukan Kearsipan sesuai ketentuan kearsipan sebesar 100%.

Sedangkan Untuk indikator Sekretariat dibawah target yang ditentukan,disebabkan oleh faktor sebagai berikut:

1. ada salah satu indikator yang tidak mampu untuk mendongkrak nilai SAKIP Pemerintah Provinsi Banten adalah belum adanya program/kegiatan yang dijadikan percontohan OPD/Provinsi lain pada Pemerintah Provinsi Banten

Untuk indikator Kinerja Program (eselon III) pada Tahun 2021 terdapat 2 indikator yang belum memenuhi target yang ditentukan, yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.7
Rekapitulasi Capaian Indikator Eselon III Yang Tidak Sesuai Dengan Target

Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Tindak Lanjut
1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
	-	Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	100	95	95	Interior Podcast tidak ada di RKBMD 2. Spesifikasi Komputer dan Printer serta Scaner yang ada di DPA sudah tidak tersedia di pasaran



Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan	Tindak Lanjut
	(Satuan: %)					
2. PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	- Cakupan Pelayanan Perpustakaan Sesuai Standar Minimal Perpustakaan (Satuan: %)	85	83.00	97.65	Pada Januari s.d September 2021, DPK Provinsi Banten belum membuka layanan perpustakaan untuk mengantisipasi penyebaran virus Covid 19. DPK Hanya membuka layanan i-Banten dan melayani penengembalian buku. DPK mulai membuka layanan tertutup pada Oktober s.d Desember 2021. Hal ini mengakibatkan tingkat kunjungan perpustakaan turun cukup signifikan, yang berdampak pada capaian standarisasi pelayanan perpustakaan	Proses pelayanan baik dari peminjaman buku, pengembalian buku, pendaftaran / pembuatan kartu anggota perpustakaan dilakukan secara on-line/daring. Meningkatkan layanan i-Banten dan melakukan inovasi layanan sesuai masa pandemi

Capaian Indikator kinerja Program /Kegiatan

Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja DPK Provinsi Banten pada Tahun 2021 bila dikonversi berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017 dapat dikategorikan dari Eselon II, III dan IV dalam penjelasan tabel sebagai berikut:

Tabel 3.8
Kategori Capaian Indikator kinerja Eselon II,III dan IV DPK Prov. Banten Tahun 2021

URAIAN PROG/KEG	INDIKATOR PROG/KEG	TARGET	REALISASI	STATUS CAPAIAN KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	2	3	4	5	6	7
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	A	BB	Kurang Dari Target	Untuk mencapai Indikator A harus ada Program/Kegiatan yang dijadikan percontohan SKPD atau ditiru OLEH Provinsi Lain.	Melakukan terobosan Perencanaan Program/Kegiatan Unggulan di Pemerintah Provinsi Banten
	Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah (Satuan: %)	100%	100%	Sesuai Target	Tidak Ada	Tidak Ada
	Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang	100%	95%	Kurang Dari Target	Terdapat 3 item pengadaan	Lebih cermat dan teliti dalam



URAIAN PROG/KEG	INDIKATOR PROG/KEG	TARGET	REALISASI	STATUS CAPAIAN KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	2	3	4	5	6	7
	mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah (Satuan: %)				barang yang tidak bisa dilaksanakan	penyusunan perencanaan dan penganggaran, harus disandingkan dengan RKBMD
	Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan: %)	100%	100%	Sesuai Target	Tidak Ada	Tidak Ada
	Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan: %)	100%	100%	Sesuai Target	Tidak Ada	Tidak Ada
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Akuntabel	14 Dokumen	14 Dokumen	Sesuai Target	Tidak Ada	Tidak Ada
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	Sesuai Target	Tidak Ada	Tidak Ada
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terlaksananya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	Sesuai Target	Tidak Ada	Tidak Ada
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	Sesuai Target	Tidak Ada	Tidak Ada
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Sesuai Target	Tidak Ada	Tidak Ada
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Sesuai Target	Tidak Ada	Tidak Ada
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Terlaksananya Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	2 Dokumen	2 Dokumen	Sesuai Target	Tidak Ada	Tidak Ada
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	Sesuai Target	Tidak Ada	Tidak Ada
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersusunnya Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	Sesuai Target	Tidak Ada	Tidak Ada
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dok Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Tepat Waktu	19 Dokumen	19 Dokumen	Sesuai Target	Tidak Ada	Tidak Ada
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	Sesuai Target	Tidak Ada	Tidak Ada
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	Sesuai Target	Tidak Ada	Tidak Ada



URAIAN PROG/KEG	INDIKATOR PROG/KEG	TARGET	REALISASI	STATUS CAPAIAN KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	2	3	4	5	6	7
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	Sesuai Target	Tidak Ada	Tidak Ada
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersusunnya dan dan Evaluasi Kinerja DPA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Sesuai Target	Tidak Ada	Tidak Ada
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Sesuai Target	Tidak Ada	Tidak Ada
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	Sesuai Target	Tidak Ada	Tidak Ada
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	Sesuai Target	Tidak Ada	Tidak Ada
admistrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen admistrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	Sesuai Target	Tidak Ada	Tidak Ada
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	1 Dokumen	1 Dokumen	Sesuai Target	Tidak Ada	Tidak Ada
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya admistrasi umum Perangkat Daerah	12 Bulan	12 B ulan	Sesuai Target	Tidak Ada	Tidak Ada
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	12 B ulan	Sesuai Target	Tidak Ada	Tidak Ada
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	12 B ulan	Sesuai Target	Tidak Ada	Tidak Ada
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	12 Bulan	12 B ulan	Sesuai Target	Tidak Ada	Tidak Ada
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	12 B ulan	Sesuai Target	Tidak Ada	Tidak Ada
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	12 B ulan	Sesuai Target	Tidak Ada	Tidak Ada
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	12 B ulan	Sesuai Target	Tidak Ada	Tidak Ada
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Bulan	12 B ulan	Sesuai Target	Tidak Ada	Tidak Ada
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4	1	Kurang dari Target		
Pengadaan Mebel	Terlaksananya Pengadaan Mebel	2	1	Kurang dari Target	Belanja Interior Podcast tidak dilaksanakan karena tidak ada dalam RKBMD 2021	Lebih cermat dan teliti dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran, harus disandingkan dengan RKBMD



URAIAN PROG/KEG	INDIKATOR PROG/KEG	TARGET	REALISASI	STATUS CAPAIAN KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	2	3	4	5	6	7
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2	0	Kurang dari Target	1). Belanja Komputer tidak dilaksanakan karena spesifikasi Komputer yang ada di DPA sudah tidak tersedia di pasaran 2) Belanja Printer dan scanner tidak dilaksanakan karena spesifikasi Printer serta Scanner yang ada di DPA tidak tersedia di pasaran	Lebih cermat dan teliti dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	12 Bulan	Sesuai Target	Tidak Ada	Tidak Ada
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan	Sesuai Target	Tidak Ada	Tidak Ada
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	Sesuai Target	Tidak Ada	Tidak Ada
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	12 Bulan	Sesuai Target	Tidak Ada	Tidak Ada
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tepat waktu	12 Bulan	12 Bulan	Sesuai Target	Tidak Ada	Tidak Ada
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12 Bulan	12 Bulan	Sesuai Target	Tidak Ada	Tidak Ada
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 Bulan	12 Bulan	Sesuai Target	Tidak Ada	Tidak Ada
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya	12 Bulan	12 Bulan	Sesuai Target	Tidak Ada	Tidak Ada
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 Bulan	12 Bulan	Sesuai Target	Tidak Ada	Tidak Ada



URAIAN PROG/KEG	INDIKATOR PROG/KEG	TARGET	REALISASI	STATUS CAPAIAN KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	2	3	4	5	6	7
	Indek Minat Baca Masyarakat	Nilai 45	Keterkaitan aktifitas masyarakat dalam membaca pada masyarakat Banten dapat dilakukan analisis tingkat peningkatannya dengan melalui 3 indikator, yaitu sebagai berikut: a. TFM : 61,06 (sedang) b.TDM : 55,19 (Sedang) c.TJB : 57,19 (Sedang) Minat Baca: 61,06+55,19+57,19/3: 57,81 Skroring Minat Baca :57,81	Melebihi Target		
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	CAKUPAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN UMUM, PERPUSTAKAAN KHUSUS DAN PERPUSTAKAAN SEKOLAH	100%	Target Tahun 2021 adalah 100% (192 Perpustakaan) dan tercapai 212 Perpustakaan atau 110,42%	Melebihi Target		
	CAKUPAN PELAYANAN PERPUSTAKAAN SESUAI STANDAR MINIMAL PERPUSTAKAAN	85%	Dasar perhitungan standart minimal Perpustakaan diperoleh dari 6 indikator 1. Standar Koleksi Perpustakaan :85% 2. Standar sarana dan prasarana perpustakaan : 80% 3. Standar Pelayanan Perpustakaan : 80% 4. Standar Tenaga Perpustakaan : 80% 5. Standar Penyelenggaraan Perpustakaan; 85% 6. Standar Pengelolaan	Kurang dari Target	Pada Januari s.d September 2021, DPK Provinsi Banten belum membuka layanan perpustakaan untuk mengantisipasi penyebaran virus Covid 19. DPK Hanya membuka layanan i-Banten dan melayani penengembalian buku. DPK mulai membuka layanan tertutup pada Oktober s.d Desember 2021. Hal ini mengakibatkan tingkat kunjungan perpustakaan turun cukup signifikan, yang berdampak	Proses pelayanan baik dari peminjaman buku, pengembalian buku, pendaftaran / pembuatan kartu anggota perpustakaan dilakukan secara on-line/daring. Meningkatkan layanan i-Banten dan melakukan inovasi layanan sesuai masa pandemi



URAIAN PROG/KEG	INDIKATOR PROG/KEG	TARGET	REALISASI	STATUS CAPAIAN KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	2	3	4	5	6	7
			Perpustakaan : 85% Cakupan Pelayanan Perpustakaan : $495/6 * 100 = 83\%$		pada capaian standarisasi pelayanan perpustakaan	
Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Terlaksananya Peningkatan kualitas Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	29 Kegiatan	29 Kegiatan	Sesuai Target	Tidak Ada	Tidak Ada
Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Terlaksananya Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	11 Kegiatan	11 Kegiatan	Sesuai Target	Tidak Ada	Tidak Ada
Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Terlaksananya Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	8 Kegiatan	8 Kegiatan	Sesuai Target	Tidak Ada	Tidak Ada
Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Terlaksananya Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	7 Kegiatan	7 Kegiatan	Sesuai Target	Tidak Ada	Tidak Ada
Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	3 Kegiatan	3 Kegiatan	Sesuai Target	Tidak Ada	Tidak Ada
Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	Terlaksananya Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	4 Kegiatan	4 Kegiatan	Sesuai Target	Tidak Ada	Tidak Ada
Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Terlaksananya Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	4 Kegiatan	4 Kegiatan	Sesuai Target	Tidak Ada	Tidak Ada



URAIAN PROG/KEG	INDIKATOR PROG/KEG	TARGET	REALISASI	STATUS CAPAIAN KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	2	3	4	5	6	7
	Persentase OPD yang Menyelenggarakan kearsipan sesuai Ketentuan Kearsipan	95%	Jumlah OPD Provinsi Banten yang sudah memiliki ruang record center dengan syarat pengelolaan kearsipan sudah sesuai standart berjumlah 43 OPD dari jumlah total OPD di Provinsi Banten 43 OPD, dengan hasil perhitungan sebagai berikut: % OPD = 43 / 43 *100 = 100%	Melebihi Target		
Program Pengelolaan Sistem Kearsipan	PERSENTASE DIGITALISASI ARSIP STATIS DAERAH	95%	Target Tahun 2021 adalah 26.370 lembar dan terealisasi 26.370 Lembar 26.370 lembar / 26.370*100= 100 %	Melebihi Target	Tidak Ada	Tidak Ada
	PERSENTASE DIGITALISASI ARSIP DINAMIS DAERAH	95%	Persentase digitalisasi arsip dinamis daerah adalah, OPD yang melaksanakan digitalisasi arsip dinamis sebanyak 43 OPD dari total OPD 43. Dengan analisis perhitungan sebagai berikut: % Digitalisasi Arsip Dinamis = 43/ 43 *100 = 100%	Melebihi Target		
Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	Terlaksananya Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	38 OPD	38 OPD	Sesuai Target	Tidak Ada	Tidak Ada
Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Terlaksananya Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	38 OPD	38 OPD	Sesuai Target	Tidak Ada	Tidak Ada
Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Terlaksananya Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	39 OPD	39 OPD	Sesuai Target	Tidak Ada	Tidak Ada



URAIAN PROG/KEG	INDIKATOR PROG/KEG	TARGET	REALISASI	STATUS CAPAIAN KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	2	3	4	5	6	7
Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	Terlaksananya Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	7500 Lembar	7500 Lembar	Sesuai Target	Tidak Ada	Tidak Ada
Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Terlaksananya Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	7500 Lembar	7500 Lembar	Sesuai Target	Tidak Ada	Tidak Ada
Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	Terkelolanya Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	4 Kegiatan	4 Kegiatan	Sesuai Target	Tidak Ada	Tidak Ada
Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	Tersedia Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	4 Kegiatan	4 Kegiatan	Sesuai Target	Tidak Ada	Tidak Ada
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase Pengelolaan Arsip OPD sesuai Standar	100%	Jumlah OPD Provinsi Banten yang sudah memiliki ruang record center dengan syarat pengelolaan kearsipan sudah sesuai standart berjumlah 43 OPD dari jumlah total OPD di Provinsi Banten 43 OPD, dengan hasil perhitungan sebagai berikut: % OPD = 43 / 43 *100 = 100%	Sesuai Target	Tidak Ada	Tidak Ada
Pemusnahan Arsip dilindungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Terlaksananya Pemusnahan Arsip dilindungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	7 Kegiatan	6 Kegiatan	Kurang dari Target		
Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Terlaksananya Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	7 Kegiatan	6 Kegiatan	Kurang dari Target	Penilaian Kinerja Arsiparis tidak dilaksanakan dikarenakan narasumber ANRI yang berkompeten dibidangnya jadwal kegiatan bersamaan dengan jadwal kegiatan di	Penigkatan koordinasi lebih ditingkatkan dengan stekholder yang bersangkutan



URAIAN PROG/KEG	INDIKATOR PROG/KEG	TARGET	REALISASI	STATUS CAPAIAN KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	2	3	4	5	6	7
					ANRI	
Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun	Terlaksananya Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun	0 Kegiatan	0 Kegiatan	Kurang dari Target	Substansi sub kegiatan dan anggaran dihapus pada saat refocusing anggaran	

Upaya dan Tindak Lanjut dalam Meningkatkan Program/Kegiatan pada Urusan Perpustakaan dan Kearsipan

I. Urusan Perpustakaan

Upaya dan tindak lanjut DPK dalam meningkatkan capaian program/kegiatan:

- Peningkatan Kualitas Layanan dan Kerjasama Perpustakaan, dengan melaksanakan Pelayanan prima dan penataan koleksi/stock opname/weeding/fumigasi selama off layanan perpustakaan untuk mendukung tingkat kunjungan perpustakaan pada saat dibuka nanti;
- Pengembangan layanan dan informasi Perpustakaan berbasis teknologi dan informatika. Pelaksanaan yang telah dilakukan memberikan layanan audio visual (pemutaran film) dan layanan media elektronik (website) serta install aplikasi inisilite ke setiap perpustakaan yang dikunjungi layanan mobil pintar, hal ini untuk mencapai indikator jumlah kunjungan ke website DPK Provinsi Banten;
- Melaksanakan Pembinaan dan Pengembangan Minat dan budaya baca masyarakat telah diselenggarakan lomba bercerita tingkat SD/MI se- Provinsi Banten/lomba perpustakaan teladan, lomba perpustakaan sekolah, lomba perpustakaan desa/kabupaten merupakan upaya meningkatkan gambar budaya membaca, untuk mencapai jumlah kunjungan ke perpustakaan;
- Pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan Pengembangan sistem pengelolaan perpustakaan, adalah dengan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para pengelola perpustakaan ke depan hal ini terkait dengan indikator capaian program jumlah perpustakaan sesuai standar yang harus didukung dengan sarana dan prasarana perpustakaan, dimana pada saat ini sudah terdapat 152 perpustakaan menuju standar dan masih banyak lagi yang harus dikejar;
- Melaksanakan pengolahan Bahan Deposit, otomasi, karya cetak/karya rekam dan naskah kuno tentang Banten yang diselenggarakan dengan menerbitkan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah sebagai informasi tentang



keberadaan koleksi bahan pustaka yang ada diperpustakaan, selain menyusun KID juga melakukan otomasi Perpustakaan untuk memberikan kemudahan dalam pengelolaan perpustakaan.

- f. Mengembangkan Program Transformasi Perpustakaan berbasis inklusi social dengan memperbanyak kelas pemustaka dengan buku bersubjek lifeskill.
- g. Membuat Pilot Project Pembinaan Perpustakaan pada 8 (delapan) kab/kota se Provinsi Banten.
- h. kuantitas dan kualitas tenaga fungsional pustakawan yang ada di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten lebih ditingkatkan dalam rangka meningkatkan pemenuhan kebutuhan pemustaka.
- i. Optimalisasi kegiatan Pembinaan dan pendampingan Kelembagaan Perpustakaan Ke Kota/Kab
- j. Menindaklanjuti Perda No. 13 Tahun 2019 tentang Perpustakaan dengan regulasi lainnya.
- k. dukungan stockholder terkait penganggaran dalam rangka pembinaan berbagai jenis perpustakaan yang ada di Provinsi Banten

II. Urusan Kearsipan

- a. Peningkatan kualitas tenaga fungsional kearsipan maupun tenaga pengelola kearsipan OPD melalui Bintek dan Inhouse Training.
- b. Mewujudkan Provinsi Banten tertib arsip dengan di dukung oleh khasanah arsip yang lengkap serta pemanfaatan teknologi informasi komunikasi berupa SIKD dan JIKN.
- c. Melaksanakan pengawasan kearsipan internal (lingkup OPD Provinsi Banten) dan eksternal (LKD Kab/Kota) untuk meningkatkan indek pengawasan kearsipan.
- d. Koordinasi dan edukasi internal kepada pimpinan mengenai pentingnya implementasi SIKD dalam pemerintahan.
- e. Melaksanakan pemusnahan arsip.

3.1.3 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

DPK Provinsi Banten pada Tahun 2021 memperoleh anggaran belanja sebesar Rp. 26.007.016.000,-, dengan realisasi Rp . 22.793.620.740,00,- atau 87,64. Sisa belanja sebesar Rp. 3.213.395.260,- atau 12,36%. Terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal dengan rincian sebagai berikut :



Tabel 3.9
Target dan Realisasi Belanja Tahun 2021

No	Uraian	Pagu Anggaran	Jumlah Realisasi (Rp)			Lebih / (Kurang)	
			S/D Periode Lalu	Periode Ini	Total	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Belanja Daerah						
5.1	Belanja Operasional	25.092.384.300	0,00	22.288.437.370	22.288.437.370	(2.803.926.930)	88,83
5.1.01	Belanja Pegawai	15.902.200.000	0,00	14.892.851.435	14.892.851.435	(1.009.348.565)	93,65
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.190.164.300	0,00	7.395.585.935	7.395.585.935	(1.794.578.365)	80,47
5.2	Belanja Modal	914.651.700	0,00	505.183.370	505.183.370	(409.468.330)	55,23
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	398.151.700	0,00	59.950.000	59.950.000	(338.201.700)	15,06
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	516.500.000	0,00	445.233.370	445.233.370	(71.266.630)	86,20
	Jumlah Belanja Daerah	26.007.016.000	0,00	22.793.620.740	22.793.620.740	(3.213.395.260)	87,64

Sedangkan rincian Realisasi Program dan Kegiatan DPK pada Tahun 2021 diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 3.10
Realisasi Program dan Kegiatan DPK Provinsi Banten Tahun 2021

No.	Nama Kegiatan & Tolok Ukur	Pagu Anggaran (Rp.)	Bobot (%)	Rencana Fisik (%)	Realisasi				Sisa Anggaran		
					Fisik (%)		Keuangan		(Rp.)	(%)	
					Tertimbang/ Kegiatan	Tertimbang/ Instansi	(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI										
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.941.700.000,00	61,30	100,00	100,00	61,30	14.926.601.435,00	93,63	1.015.098.565,00	6,37	
2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	147.426.000,00	0,57	100,00	100,00	0,57	130.404.000,00	88,45	17.022.000,00	11,55	
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	8.000.000,00	0,03	100,00	100,00	0,03	5.140.000,00	64,25	2.860.000,00	35,75	
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	754.188.000,00	2,90	100,00	100,00	2,90	568.076.080,00	75,32	186.111.920,00	24,68	
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	400.000.000,00	1,54	100,00	24,38	0,37	59.950.000,00	14,99	340.050.000,00	85,01	



No.	Nama Kegiatan & Tolok Ukur	Pagu Anggaran (Rp.)	Bobot (%)	Rencana Fisik (%)	Realisasi				Sisa Anggaran	
					Fisik (%)		Keuangan		(Rp.)	(%)
					Tertimbang/ Kegiatan	Tertimbang/ Instansi	(Rp.)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.431.798.000,00	13,20	100,00	100,00	13,20	3.233.114.355,00	94,21	198.683.645,00	5,79
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	782.676.000,00	3,01	100,00	100,00	3,01	717.690.200,00	91,70	64.985.800,00	8,30
II	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN									
8	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	2.078.785.000,00	7,99	100,00	98,31	7,86	1.463.069.370,00	70,38	615.715.630,00	29,62
9	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	830.668.000,00	3,19	100,00	100,00	3,19	751.317.500,00	90,45	79.350.500,00	9,55
III	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP									
10	Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	374.000.000,00	1,44	100,00	70,64	1,02	153.116.000,00	40,94	220.884.000,00	59,06
11	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	397.295.000,00	1,53	100,00	90,83	1,39	263.890.300,00	66,42	133.404.700,00	33,58
12	Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	229.230.000,00	0,88	100,00	100,00	0,88	193.988.000,00	84,63	35.242.000,00	15,37
IV	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP									
13	Pemusnahan Arsip dilindungi Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	631.250.000,00	2,43	100,00	80,11	1,94	327.263.500,00	51,84	303.986.500,00	48,16
	Jumlah	26.007.016.000,00	100,00	100,00		97,66	22.793.620.740,00	87,64	3.213.395.260,00	12,36

Berdasarkan gambaran pencapaian tabel diatas, dan fakta bahwa sepanjang tahun Pelaksanaan APBD 2021 Provinsi telah melakukan tahapan efisiensi anggaran, diantaranya adalah tahapan APBD refocusing dan APBD Perubahan yang telah dilaksanakan selama 2 tahun berturut – turut karena dampak dari covid -19, untuk menghadapi hal tersebut maka semua program/kegiatan pada DPK Provinsi Banten secara signifikan akan melakukan perubahan baik secara volume kegiatan ataupun dalam strategi pelaksanaan kegiatan agar tidak mengganggu indikator yang telah ditetapkan dalam renstra DPK Provinsi Banten.



Upaya efisiensi penggunaan sumberdaya anggaran tidak mengurangi target yang telah ditetapkan dikarenakan pada saat refocusing anggaran untuk penanganan Covid – 19 telah dilakukan penyesuaian target sampai dengan APBD Perubahan sehingga target kegiatan bisa tercapai semuanya pada akhir tahun

3.1.4 Analisis Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Penyerapan anggaran kegiatan Tahun 2021 terdapat beberapa permasalahan (ketidaktercapaian realisasi serapan hingga 100%), hal tersebut disertai solusi dalam menindaklanjuti permasalahan tersebut pada tahun mendatang.

Adapun permasalahan dan solusi per program yang mendukung ketercapaian indikator kinerja OPD dituangkan dalam penjelasan berikut :

1. Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

PROVINSI:

Target : Rp. 21.465.788.000,00

Realisasi : Rp. 19.640.976.070,00 (91.49 %)

Program ini terdiri dari 7 (tujuh kegiatan) yang secara umum capaian realisasi anggarannya berada diatas 75 % kecuali kegiatan Administrasi Kepegawaian Daerah (64,75%) dan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang UrusanPemerintah Daerah (14,99).

Permasalahan :

1. Pada Kegiatan Administrasi Kepegawaian Daerah, terdapat sisa kegiatan belanja kediklatan berbayar yang tidak bisa dipergunakan lagi karena sisa tersebut tidak cukup untuk pendaftaran lanjutan
2. Pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, pada sub kegiatan Pengadaan Mebel dari target 2 kegiatan terealisasi 1 kegiatan, yang disebabkan pengadaan mebel interior podcast tidak tercatat dalam buku RKBMD sehingga pekerjaan tidak dapat dilaksanakan. Kemudian pada sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya dari target 2 Kegiatan tidak dapat terealisasi semuanya yang disebabkan oleh spesifikasi peralatan computer yang terdapat dalam DPA (Printer dan Scanner) sudah tidak tersedia di pasaran. Silpa besar juga dihasilkan dari pembelian rak arsip, dimana harga pasar nilainya jauh lebih rendah daripada harga pada SSH SIPD, sehingga mengakibatkan sisa anggaran yang cukup besar



2. Indek Minat Baca Masyarakat (nilai)

PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN

Target : Rp. 2.909.453.000,00

Realisasi : Rp. 2.214.386.870,00 (76,11)

Program ini terdiri dari 2 (dua kegiatan) dimana salah satu kegiatannya yakni kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi memiliki realisasi anggaran dibawahn 75%, yakni sebesar 70.38%.

Permasalahan :

Secara fisik seluruh sub kegiatan pada kegiatan Pengelolaan Perpustakaan tingkat daerah Provinsi dilaksanakan 100%. Sisa anggaran yang cukup besar yakni sebesar Rp 376.563.580 berasal dari silpa pengadaan buku, dimana harga pasaran jauh lebih rendah dari harga SIPD, dan sisa tersebut tidak dapat dipergunakan lagi ataupun didelete pada APBD-P. Terdapat pula sisa anggaran sebesar Rp 105.298.550 berasal dari sub kegiatan pembinaan perpustakaan dimana perjalanan dinas pendampingan standarisasi Perpustakaan Sekolah tidak dilaksanakan karena metode akreditasi diubah menjadi berbasis daring. Kemudian sisa anggaran sebesar Rp 104.216.500 dari sub kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik dimana terdapat kesalahan penempatan kode rekening juri, dan setelah berkonsultasi dengan Inspektorat kode rekening tersebut tidak bisa direalisasikan

3. Persentase OPD yang Menyelenggarakan kearsipan sesuai Katentuan Kearsipan

Target 2 Program : Rp. 1.631.775.000,00

Realisasi : Rp. 938.257.800,00 (57,50%)

PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP

Program ini terdiri dari 3 kegiatan, dimana 2 (dua) kegiatannya memiliki realisasi anggaran dibawah 75%, yakni Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi dengan realisasi anggaran 40,94% dan Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi dengan realisasi anggaran 66,42%.

Permasalahan :

1. Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi

Pada sub kegiatan Penciptaan dan penggunaan arsip dinamis pekerjaan Pengawasan Kearsipan Internal OPD Prov. Banten dan Eksternal LKD Kab/Kota dari target 2 kegiatan terealisasi 1 kegiatan, dikarenakan evaluasi pengawasan kearsipan ke lokus LKD Kab/Kota tidak dilaksanakan dan diganti dengan zoom meeting karena faktor pandemic. Selanjutnya pada sub kegiatan Pemeliharaan Dan Penyusutan Arsip Dinamis pada pekerjaan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi dari target 6 kegiatan Terealisasi 1 kegiatan yakni Sosialisasi aplikasi SRIKANDI. Untuk

pendampingan ke OPD tidak dilaksanakan dikarenakan menunggu juknis dari ANRI

2. Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi

Kegiatan pembuatan aplikasi pengelolaan arsip statis tidak dilaksanakan dikarenakan ada kesalahan penganggaran, dan setelah berkoordinasi dengan Arsip Nasional RI diputuskan untuk memakai aplikasi sejenis dari Arsip Nasional RI di tahun depan

PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP

Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan yakni kegiatan Pemusnahan Arsip dilindungi Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 tahun dimana realisasi anggarannya adalah sebesar 51,84%

Permasalahan :

Pada sub kegiatan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun pada pekerjaan Penyusunan Draft Pergub Regulasi Program Arsip Vital tidak bisa terserap 100% disebabkan oleh Belum Selesainya Penyusunan Draft Final Pergub Program Arsip Vital Menjadi Pergub Sehingga Biaya Cetak Pergub tidak dapat diserap. Selain itu Penyusunan Draft Pergub Regulasi Penyusutan Arsip tidak terserap 100% disebabkan karena belum Selesainya Penyusunan Draft Final Pergub Program Penyusutan Arsip Menjadi Pergub Sehingga Biaya Cetak Pergub juga tidak dapat diserap. Terakhir, penilaian Kinerja Arsiparis Provinsi Banten tidak dilaksanakan dikarenakan narasumber ANRI yang berkompeten tidak tersedia jadwal kosong.

Solusi :

1. Pada tahap perencanaan kegiatan perlu ketelitian dalam menyusun kebutuhan anggaran, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan efektif sesuai dengan target yang ditetapkan.
2. Dengan adanya Pandemi Covid-19, diharapkan DPK Provinsi Banten dapat menyusun strategi jangka menengah maupun panjang dan menyesuaikan pada beberapa aspek:
 - a. Melakukan inovasi aneka jenis layanan sehingga tidak hanya berbasis konvensional, namun memberikan pilihan-pilihan yang disesuaikan dengan situasi maupun kondisi (belajar dari keterbatasan akibat pandemi Covid-19)
 - b. Revisi Kebijakan (Perda/Pergub/Perka) tentang penyesuaian Program Kegiatan di masa pandemi

Secara umum efektifitas anggaran terhadap capaian Misi Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Banten dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan masih

kurang efektif/maksimal terhadap capaian kinerja misi organisasi ini disebabkan oleh faktor sebagai berikut:

1. Adanya Penurunan Target/Volume kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan karena factor masa pandemi
2. Kebijakan Gubernur Banten berkenaan dengan system kerja aparatur sipil Negara yang diberlakukan WFH dan WFO dimasa pandemic
3. Kegiatan – kegiatan yang melibatkan kerumunan ditiadakan dalam rangka memutus penyebaran covid- 19 dan dialihkan ke metode zoommeeting/daring
4. Aktivitas pelayanan perpustakaan yang ditutup dan sementara waktu menggunakan pemaksimalan i-Banten/Buku digital secara online

3.2 Realisasi Anggaran

Selama tahun 2021 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai DPK Provinsi Banten dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten DPA Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan dengan total nilai keseluruhan adalah sebesar Rp. **26.007.016.000,-** yang dipergunakan untuk Belanja operasional sebesar Rp. 25.092.364.300,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 914.651.700,-, dengan realisasi sampai akhir tahun anggaran sebesar **Rp. 22.793.620.740,- (87,64%)** sisa anggaran **Rp. 3.213.395.260,- (12,36%)**, dengan rincian realisasi sbb:

Tabel 3.11
Rekapitulasi Capaian Belanja APBD TA. 2021

No	Uraian	Pagu Anggaran	Jumlah Realisasi (Rp)			Lebih / (Kurang)	
			S/D Periode Lalu	Periode Ini	Total	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Belanja Daerah						
5.1	Belanja Operasional	25.092.384.300	0,00	22.288.437.370	22.288.437.370	(2.803.926.930)	88,83
5.1.01	Belanja Pegawai	15.902.200.000	0,00	14.892.851.435	14.892.851.435	(1.009.348.565)	93,65
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.190.164.300	0,00	7.395.585.935	7.395.585.935	(1.794.578.365)	80,47
5.2	Belanja Modal	914.651.700	0,00	505.183.370	505.183.370	(409.468.330)	55,23
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	398.151.700	0,00	59.950.000	59.950.000	(338.201.700)	15,06
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	516.500.000	0,00	445.233.370	445.233.370	(71.266.630)	86,20
	Jumlah Belanja Daerah	26.007.016.000	0,00	22.793.620.740	22.793.620.740	(3.213.395.260)	87,64

Sedangkan rincian Realisasi Program dan Kegiatan DPK pada Tahun 2021 diuraikan pada tabel berikut



Tabel 3.12
Tabel Ringkasan Realisasi Program Kegiatan Tahun 2021

No.	Nama Kegiatan & Tolok Ukur	Pagu Anggaran (Rp.)	Bobot (%)	Rencana Fisik (%)	Realisasi				Sisa Anggaran	
					Fisik (%)		Keuangan		(Rp.)	(%)
					Tertimbang/ Kegiatan	Tertimbang/ Instansi	(Rp.)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	21.465.788.000,00	82,54	100			19.640.976.070,00	91,50	1.824.811.930,00	8,50
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.941.700.000,00	61,30	100,00	100,00	61,30	14.926.601.435,00	93,63	1.015.098.565,00	6,37
2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	147.426.000,00	0,57	100,00	100,00	0,57	130.404.000,00	88,45	17.022.000,00	11,55
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	8.000.000,00	0,03	100,00	100,00	0,03	5.140.000,00	64,25	2.860.000,00	35,75
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	754.188.000,00	2,90	100,00	100,00	2,90	568.076.080,00	75,32	186.111.920,00	24,68
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	400.000.000,00	1,54	100,00	24,38	0,37	59.950.000,00	14,99	340.050.000,00	85,01
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.431.798.000,00	13,20	100,00	100,00	13,20	3.233.114.355,00	94,21	198.683.645,00	5,79
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	782.676.000,00	3,01	100,00	100,00	3,01	717.690.200,00	91,70	64.985.800,00	8,30
II	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	2.909.453.000,00	11,19	100			2.214.386.870,00	76,11	695.066.130,00	23,89
8	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	2.078.785.000,00	7,99	100,00	98,31	7,86	1.463.069.370,00	70,38	615.715.630,00	29,62
9	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	830.668.000,00	3,19	100,00	100,00	3,19	751.317.500,00	90,45	79.350.500,00	9,55
III	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	1.000.525.000,00	3,85	100			610.994.300,00	61,07	389.530.700,00	38,93
10	Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	374.000.000,00	1,44	100,00	70,64	1,02	153.116.000,00	40,94	220.884.000,00	59,06
11	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	397.295.000,00	1,53	100,00	90,83	1,39	263.890.300,00	66,42	133.404.700,00	33,58



No.	Nama Kegiatan & Tolok Ukur	Pagu Anggaran (Rp.)	Bobot (%)	Rencana Fisik (%)	Realisasi				Sisa Anggaran	
					Fisik (%)		Keuangan		(Rp.)	(%)
					Tertimbang/ Kegiatan	Tertimbang/ Instansi	(Rp.)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
12	Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	229.230.000,00	0,88	100,00	100,00	0,88	193.988.000,00	84,63	35.242.000,00	15,37
IV	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	631.250.000,00	2,43	100			327.263.500,00	51,84	303.986.500,00	48,16
13	Pemusnahan Arsip dilindungi Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	631.250.000,00	2,43	100,00	80,11	1,94	327.263.500,00	51,84	303.986.500,00	48,16
Jumlah		26.007.016.000,00	100,00	100,00		97,66	22.793.620.740,00	87,64	3.213.395.260,00	12,36

Tabel 3.13
Perbandingan Realisasi Anggaran Per Program Antara Tahun 2020 dan 2021

No	Uraian Program	Pagu		Realisasi		Sisa	
		2020	2021	2020	2021	2020	2021
1	PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN	7.631.265.250,00		7.215.852.874,00		415.412.376,00	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		21.465.788.000,00		19.640.976.070,00		1.824.811.930,00
2	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM KEARSIPAN	1.593.969.500,00		1.318.310.180,00		275.659.320,00	
	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP		1.000.525.000,00		610.994.300,00		389.530.700,00
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP		631.250.000,00		327.263.500,00		303.986.500,00
3	PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	335.907.750,00		289.772.250,00		46.135.500,00	



4	PROGRAM PENGEMBANGAN KOLEKSI DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PERPUSTAKAAN	1.103.274.000,00		992.191.254,00		111.082.746,00	
	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN		2.909.453.000,00		2.214.386.870,00		695.066.130,00

Pada Tahun 2021 terdapat perubahan Program/Kegiatan dari Matrik Pergub Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Perubahan Renstra Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2017-2022 Dengan Matrik sandingan Pemetaan Kepmendagri Nomor 050-7308 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Secara Signifikan Program dan Kegiatan berubah 100%

BAB IV PENUTUP

a. Kesimpulan

Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan laporan yang memberikan penjelasan mengenai Pencapaian Kinerja Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Banten selama Tahun 2021. Capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2021 tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) Tahun sebelumnya sebagai tolok ukur keberhasilan Tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Secara umum berdasarkan uraian pada bab sebelumnya dapat dikatakan kinerja Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Banten masih dalam kategori “Tinggi” berdasarkan pengelompokan perhitungan PERMENDAGRI No. 86 Tahun 2017, meskipun ada beberapa hal terutama dalam pencapaian sasaran program yang masih perlu di tingkatkan dimasa yang akan datang.

Selain itu juga di rasakan perlu untuk meningkatkan peran serta stakeholder dalam upaya mendukung program pembangunan di bidang perpustakaan. Upaya pendekatan lintas program dan lintas sektoral serta pemberdayaan masyarakat dalam rangka mendukung pembangunan bidang perpustakaan sangat mempengaruhi berhasil tidaknya suatu pembangunan.

b. Saran

Agar suatu kegiatan dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan sebaiknya dilakukan evaluasi berkala oleh pimpinan dan diharapkan masing-masing bidang lebih fokus melaksanakan program dan kegiatannya agar sasaran sebagaimana tersebut dalam Rencana Kerja Tahunan tercapai

Serang, Februari 2022

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
PROVINSI BANTEN



USMAN ASSHIDDIQI OOHARA, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Tk. I/IV.b
NIP. 19700320 200112 1 001



Lamiran Penilaian Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Organisasi Perangkat Daerah (AKIP-OPD) Provinsi Banten Tahun 2021



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
INSPEKTORAT DAERAH

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
Telp. (0254) 7039946, Fax. (0254) 267041 Palima - Serang

PENILAIAN HASIL EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (AKIP-OPD)
PROVINSI BANTEN
TAHUN 2021

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Empat bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di kantor Inspektorat Daerah Provinsi Banten, telah disepakati hasil evaluasi yang dilakukan secara terbatas terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten tahun 2021 sebesar **70,65 dengan Kategori BB (Sangat Baik)** yang diperoleh dari hasil penilaian pemenuhan kriteria terhadap 4 (empat) komponen dan 12 (dua belas) sub komponen adalah sebagai berikut :

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	BOBOT	JAWABAN	NILAI
1	2	3	4	5
1.	Perencanaan Kinerja	30		22,20
	a. Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6	A	5,4
	b. Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)	9	B	6,3
	c. Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15	B	10,5
2.	Pengukuran Kinerja	30		18,3
	a. Pengukuran Kinerja telah dilakukan	6	C	3
	b. Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	9	BB	7,2
	c. Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15	B	10,5
3.	Pelaporan Kinerja	15		10,50
	a. Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	3	B	2,1
	b. Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya	4,50	B	3,15



NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	BOBOT	JAWABAN	NILAI
1	2	3	4	5
	c. Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7,50	B	5,25
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25		17,25
	a. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	5	A	4,5
	b. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	7,50	B	5,25
	c. Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja	12,50	CC	7,5
NILAI AKUNTABILITAS KINERJA		100,00		70,65

Hasil penilaian pemenuhan kriteria pada komponen dan sub komponen yang telah dilaksanakan terdapat beberapa catatan sebagai berikut :

1. PERENCANAAN KINERJA

a. Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia

Kriteria dokumen perencanaan kinerja telah terpenuhi.

b. Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)

Dokumen Perencanaan kinerja belum menggambarkan hubungan kinerja, strategi, kebijakan bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi yang berkaitan (crosscutting)

c. Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan

Terdapat kriteria pemanfaatan perencanaan kinerja dalam mewujudkan hasil yang berkesinambungan belum terpenuhi, yaitu dokumen Renja tidak menyajikan hasil analisis perbaikan kinerja tahun sebelumnya;

2. PENGUKURAN KINERJA

a. Pengukuran Kinerja telah dilakukan

Terdapat beberapa kriteria keberadaan pengukuran kinerja yang belum terpenuhi, dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Belum ada pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja;
- 2) Tidak ditemukan mekanisme yang jelas terkait pengukuran data kinerja (SOP pengumpulan data)

b. Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan

Kriteria pengukuran kinerja menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara efektif dan efisien telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan telah terpenuhi.

c. Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien

Kriteria yang tidak terpenuhi pada sub komponen ini yaitu :

Pengukuran kinerja tidak dijadikan dasar pengangkatan/pemberhentian jabatan struktural/fungsional.

3. PELAPORAN KINERJA

a. Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja

Terdapat kriteria dalam dokumen laporan kinerja yang belum terpenuhi, yaitu laporan kinerja belum disusun secara berkala baik triwulanan atau semesteran.

b. Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya

Dokumen laporan kinerja tidak menyajikan informasi perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional.

c. Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya

Terdapat beberapa kriteria yang tidak terpenuhi pada sub komponen ini yaitu :

1. Informasi dalam laporan kinerja belum digunakan dalam penyesuaian kinerja pada tahun berikutnya;
2. Informasi dalam laporan kinerja belum mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi

4. EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL

a. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan

Kriteria evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan.

b. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai

Kriteria evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan sesuai mandat kebijakan nasional, namun tidak ada informasi bahwa evaluasi AKIP internal dilaksanakan oleh SDM yang memadai.

c. Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja

Terdapat beberapa kriteria yang tidak terpenuhi pada sub komponen ini yaitu tidak terdapat bukti pendukung penyampaian hasil tindak lanjut atas pemantauan dan supervisi yang dilaksanakan oleh tim evaluasi capaian SAKIP, sehingga berdampak pada;

- 1) Tidak dapat mengukur seberapa besar peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi AKIP Internal;
- 2) Hasil evaluasi AKIP internal belum dimanfaatkan dalam perbaikan peningkatan akuntabilitas kinerja;
- 3) Hasil evaluasi AKIP internal belum dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.

5. CAPAIAN KINERJA

a. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja

Pengukuran kinerja telah disajikan dalam laporan kinerja dengan menampilkan data target dan realisasi, namun tidak menyajikan capaian kinerja. Target dan realisasi capaian kinerja sasaran Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD (nilai)	Nilai	85	* Menunggu penilaian dari inspektorat Provinsi Banten	-
2.	Meningkatnya Pengelolaan arsip pemerintah daerah yang berkualitas	Persentase OPD yang Menyelenggarakan kearsipan sesuai Ketentuan Kearsipan (%)	Persen	95	100	-
3.	Meningkatnya Budaya Literasi	Indek Minat Baca Masyarakat (Nilai)	Nilai	45	57,81	-

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan hasil sebagai berikut:

- Sasaran strategis Meningkatnya penyelenggaraan yang akuntabel, efektif dan efisien dengan indikator kinerja yaitu Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD pada tahun 2021 dengan realisasi menunggu penilaian dari Inspektorat Provinsi Banten;
- Sasaran strategis Meningkatnya pengelolaan arsip pemerintah daerah yang berkualitas dengan indikator kinerja yaitu persentase OPD yang menyelenggarakan kearsipan sesuai ketentuan kearsipan pada tahun 2021 sudah melebihi target kinerja yang ditetapkan, namun perhitungan realisasi sebesar 100% masih diragukan perhitungannya karena tidak berdasarkan perhitungan (formulasi) yang valid berdasarkan rumus perhitungan serta dapat diselusuri sumber data atau basis data yang dapat dipercaya;
- Sasaran strategis meningkatnya budaya literasi dengan indikator kinerja yaitu persentase kebutuhan sarana dan prasarana transportasi telah melebihi target kinerja yang ditetapkan dengan realisasi 57,81 masih diragukan perhitungannya karena tidak berdasarkan perhitungan (formulasi) yang valid berdasarkan rumus perhitungan serta tidak dapat diselusuri sumber datanya.

b. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan tahun sebelumnya

Laporan Kinerja telah menyajikan perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2021 dengan tahun sebelumnya, namun belum menyajikan perbandingan capaian kinerja, sehingga tidak dapat dibandingkan rata-rata capaian kinerja antara tahun 2021 dengan tahun sebelumnya. Target dan realisasi capaian kinerja sasaran Tahun 2021 dengan Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

No	Sasaran	Indikator Kinerja	2020			2021		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD (nilai)	80	80.05	-	85	* Menunggu penilaian dari inspektorat	-
2.	Meningkatnya	Persentase	90	95.35	-	95	100	-



	Pengelolaan arsip pemerintah daerah yang berkualitas	OPD yang Menyelenggarakan kearsipan sesuai Katentuan Kearsipan (%)						
3.	Meningkatnya Budaya Literasi	Indek Minat Baca Masyarakat (Nilai)	40	59,79	-	45	57,81	-

c. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target dalam pembangunan jangka menengah (Renstra)

Laporan Kinerja belum menjelaskan perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi. Target dan realisasi capaian kinerja sasaran Tahun 2021 dengan target kinerja sasaran pada Renstra Perubahan untuk Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja pada Renstra	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD (nilai)	A	-	-
2.	Meningkatnya Pengelolaan arsip pemerintah daerah yang berkualitas	Persentase OPD yang Menyelenggarakan kearsipan sesuai Katentuan Kearsipan (%)	95	100	-
3	Meningkatnya Budaya Literasi	Indek Minat Baca Masyarakat (Nilai)	45	57,81	-



Berita Acara ini dibuat dan telah dinyatakan selesai serta tidak ada keraguan atas hasil evaluasi yang telah dilaksanakan untuk dipergunakan dalam penyusunan capaian hasil Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Provinsi Banten tahun 2021 dan sebagai bagian dari penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Provinsi Banten tahun 2021.

Serang, Februari 2022

Mengetahui

Kepala Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan Provinsi Banten

Usman Asshiddiqi Qohara, S.Sos, M.Si
NIP. 19730320 200112 1 001

Tim Evaluasi
Inspektorat Daerah Provinsi Banten

Inspektur Pembantu III

Endad Haryanto, SE, M.Si
NIP. 19730403 200112 1 003

Tim Penyusun LKIP
Kasubag PEP

Neni Widiastuti, S.Sos
NIP. 19750228 2003122 002

Supervisi

Dewi Kuraesin, SE, M.Ak
NIP. 19650106 199603 2 001

Ketua Tim

Ira Rohmayanti, S.Sos
NIP. 19820402 200112 2 001

Anggota

Litawati, SE
NIP. 19760311 200902 2 001



Lampiran PERKIN MURNI 2021



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : USMAN ASSHIDDIQI QOHARA, S.Sos, M.Si

Jabatan : KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
PROVINSI BANTEN

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. H. WAHIDIN HALIM, M.Si

Jabatan : GUBERNUR BANTEN

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

SERANG, JANUARI 2021

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Dr. H. WAHIDIN HALIM, M.Si

USMAN ASSHIDDIQI QOHARA, S.Sos, M.Si

NIP. 197003202001121001



SATUAN KERJA : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten

DPA TA-2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Budaya Literasi	Indek Minat Baca Masyarakat	Nila	45.00
2	Meningkatnya Pengelolaan arsip pemerintah daerah yang berkualitas	Persentase OPD yang Menyelenggarakan kearsipan sesuai Ketentuan Kearsipan	%	95.00
3	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) DPD	Nila	85

PENDAPATAN DAERAH

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Total Jumlah Pendapatan : Rp. 0.00

BELANJA

Urusan / Program	Anggaran
2:23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	21.796.000.000.00
2:23:02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	21.796.000.000.00
2:24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	1.815.000.000.00
2:24:02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	1.410.000.000.00
2:24:03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	405.000.000.00

Total Jumlah Anggaran : Rp. 23.611.000.000.00

GOVERNUR

Dr. H. WAHIDIN HALIM, M.SI

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Provinsi Banten

USMAN ASSHIDIQI QOHARA, S.Sos, M.Si
NIP. 197003202001121001



Lampiran PERKIN PERUBAHAN 2021



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **USMAN ASSHIDDIQI QOHARA, S.Sos, M.Si**
Jabatan : **KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dr. H. WAHIDIN HALIM, M.Si**
Jabatan : **GUBERNUR BANTEN**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Serang, Oktober 2021

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Dr. H. WAHIDIN HALIM, M.Si **USMAN ASSHIDDIQI QOHARA, S.Sos, M.Si**
NIP. 19700320 200112 1 001 NIP. 19700320 200112 1 001

SATUAN KERJA : DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

DPPA TA-2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Budaya Literasi	Indek Minat Baca Masyarakat	Nilai	45.00
2	Meningkatnya Pengelolaan arsip pemerintah daerah yang berkualitas	Persentase OPD yang Menyelenggarakan kearsipan sesuai Ketentuan Kearsipan	%	95.00
3	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	Nilai	85

PENDAPATAN DAERAH

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

JUMLAH PENDAPATAN Rp. 0,00

BELANJA

KODE	URUSAN / PROGRAM	ANGGARAN
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	24.375.241.000,00
2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	21.465.788.000,00
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	2.909.453.000,00
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	1.631.775.000,00
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	1.000.525.000,00
2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	631.250.000,00

JUMLAH BELANJA Rp. 26.007.016.000,00

GUBERNUR

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN


Dr. H. WAHIDIN HALIM, M.Si

USMAN ASSHIDDIQI QOHARA, S.Sos, M.Si
NIP. 19700320 200112 1 001 NIP. 19700320 200112 1 001